

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

Maghfiroh Rahma Nur Annisa

NPP. 32.0447

Asdaf Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0447@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Roslianah, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The high poverty rate in Kabupaten Purworejo, which exceeds the provincial and national averages, shows that there are still gaps in access to economic, education, health, and services. gaps in access to the economy, education, health, and basic services. basic services. This condition indicates the need to evaluate the effectiveness of poverty reduction programs that have been implemented by the regional government. poverty reduction programs that have been implemented by the regional government. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and describe the role of the Regional Government of Purworejo Regency in Poverty Reduction and also to determine and describe the factors that support and factors that hinder the role of the Regional Government of Purworejo Regency in Poverty Reduction. **Method:** The research method used is qualitative with a descriptive approach. **Result:** Based on the results of the research, the role of local governments in poverty reduction in Purworejo Regency, Central Java Province, has generally played a good role. However, it is certainly not free from several obstacles such as budget limitations, the number and quality of human resources that need to be improved, and the limitations of inaccurate data on the poor. **Conclusion:** The role of the Regional Government of Kabupaten Purworejo in poverty reduction is considered quite effective through clear regulations, cross-sectoral coordination, and the involvement of various parties. However, challenges such as budget constraints and community mentality still need to be overcome through continuous evaluation and more optimal collaboration.

Keywords: Role, Government, Poverty Alleviation, Purworejo Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo yang melebihi rata-rata provinsi dan nasional menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Kondisi ini menandakan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. **Tujuan:** Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam Penanggulangan Kemiskinan dan juga untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung serta faktor yang menghambat Peran Pemerintah Daerah Kabupaten

Purworejo dalam Penanggulangan Kemiskinan. **Metode:** Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil Penelitian, Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah secara umum sudah berperan dengan baik. Namun, tentu tidak lepas dari beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta keterbatasan data masyarakat miskin yang kurang akurat. **Kesimpulan:** Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan kemiskinan dinilai cukup efektif melalui regulasi yang jelas, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan berbagai pihak. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan mentalitas masyarakat masih perlu diatasi melalui evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi yang lebih optimal.

Kata kunci: Peran, Pemerintah, Penanggulangan Kemiskinan, Kabupaten Purworejo

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial klasik yang masih menjadi isu utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (2024), kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur berdasarkan pengeluaran minimum. Pandangan serupa disampaikan oleh Zahrawati (2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan terjadi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Oleh karena itu, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata, melainkan juga berkaitan dengan akses pendidikan, kesehatan, serta ketimpangan struktural yang kompleks.

Hingga tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat masih lebih dari 25 juta jiwa dengan rata-rata persentase sebesar 9,40% dalam tiga tahun terakhir (BPS, 2024). Pandemi COVID-19, inflasi harga bahan pokok, serta lambatnya pemulihan ekonomi menjadi faktor signifikan yang memperburuk kondisi tersebut. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan JKN berupaya menekan angka kemiskinan melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat.

Di tingkat provinsi, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 10,57% pada tahun 2024. Kabupaten Purworejo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah bahkan dikategorikan sebagai zona merah kemiskinan karena memiliki rata-rata persentase kemiskinan sebesar 11,28% dalam tiga tahun terakhir, lebih tinggi dari rata-rata provinsi maupun nasional (BPS, 2024). Berdasarkan data Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2023, terdapat lebih dari 70 desa yang tergolong dalam zona merah kemiskinan, yang mayoritas disebabkan oleh faktor struktural seperti keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengadopsi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersinergi dengan peraturan nasional dan provinsi, antara lain dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta melaksanakan berbagai program strategis berbasis rumah tangga, pemberdayaan usaha mikro, dan pelatihan kerja. Namun, hingga kini, angka kemiskinan belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo 2021–2026.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk

menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dilaksanakan, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambatnya. Penelitian ini akan menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas sebagai landasan untuk mengkaji peran aktor pemerintah dalam konteks tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada dimensi ekspektasi, norma, performa, serta evaluasi dan sanksi dalam implementasi kebijakan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas nasional yang dituangkan dalam berbagai kebijakan strategis, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 hingga Peraturan Daerah tingkat kabupaten. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas kemiskinan dari aspek ekonomi, sosial, hingga efektivitas program bantuan sosial, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Selain itu, kajian tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan juga banyak difokuskan pada pendekatan makro seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, dan akses pelayanan dasar.

Namun, masih terbatas kajian yang secara spesifik menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah (terutama di tingkat kabupaten) dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan teori peran aktor kebijakan. Namun, implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana peran pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan mampu menyesuaikan antara ekspektasi masyarakat, norma hukum yang berlaku, performa birokrasi, hingga mekanisme evaluasi dan sanksi terhadap pelaksana kebijakan.

Kondisi ini terlihat jelas di Kabupaten Purworejo yang tergolong sebagai zona merah kemiskinan di Jawa Tengah, dengan rata-rata persentase kemiskinan sebesar 11,28%, lebih tinggi dibandingkan angka provinsi maupun nasional. Meskipun berbagai program seperti PKH, JKN, BPNT, dan pelatihan kerja telah digulirkan, kenyataannya target penurunan kemiskinan dalam RPJMD 2021-2026 belum tercapai. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan ketimpangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan yang belum terungkap secara menyeluruh.

Di sisi lain, belum banyak penelitian yang secara mendalam menggunakan pendekatan teori peran dari Biddle dan Thomas untuk menganalisis pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Teori ini mencakup dimensi ekspektasi, norma, performa, serta evaluasi dan sanksi, yang sangat relevan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan oleh aktor lokal.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam hal analisis peran aktor pemerintah daerah secara konseptual dan empirik dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menanggulangi kemiskinan menggunakan pendekatan teori peran Biddle dan Thomas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kebijakan publik lokal serta memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya memperkuat landasan teoritis dan memastikan relevansi serta kebaruan studi, penelitian ini mengkaji sejumlah karya terdahulu yang berfokus pada isu kemiskinan dan peran pemerintah dalam penanggulangannya. Penelitian oleh Lindiasari dan Ramadhani

(2019) meneliti efektivitas bantuan sosial seperti JKN-PBI, Rastra, dan PKH terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKN-PBI memberikan dampak paling dominan dalam mengurangi kemiskinan, dengan tanda negatif menunjukkan pengurangan yang signifikan pada jumlah masyarakat miskin. Program ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menanggulangi kemiskinan, meskipun faktor perlambatan ekonomi tidak berpengaruh signifikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farhani (2023) mengenai strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah, ditemukan bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi dampak kemiskinan ekstrem. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian saat ini adalah pada lokus penelitian, di mana penelitian Farhani berfokus di Kabupaten Bener Meriah, sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo.

Haruna dkk. (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, di mana Dinas Sosial berperan aktif dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial, meskipun masih terdapat ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini dalam menggunakan metode kualitatif, tetapi lokus dan teori yang digunakan berbeda, dengan penelitian ini mengadopsi teori peran dari Biddle dan Thomas.

Setiawan (2023) dalam penelitiannya di Kota Palangkaraya mengenai program penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa meskipun aspek sosial dan pendidikan berjalan sesuai tujuan, program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) masih belum terealisasi dengan optimal. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana program kemiskinan di tingkat daerah dapat menghadapi kendala dalam implementasi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini dalam hal metode kualitatif, namun penelitian Setiawan berfokus pada program KUBE, sementara penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah secara umum.

Rivai (2021) mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru melalui program pemberdayaan masyarakat berhasil menurunkan angka kemiskinan, meskipun penurunan tersebut tidak signifikan. Penelitian ini berfokus pada keberhasilan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, yang berfokus pada masyarakat miskin yang terlibat dalam program tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, namun penelitian saat ini lebih menekankan pada peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purworejo.

Secara umum, penelitian-penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan, baik dari segi kebijakan, implementasi, maupun peran berbagai aktor. Namun demikian, belum ditemukan kajian yang secara spesifik meneliti peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo, sehingga penelitian ini menawarkan kebaruan dari segi lokasi, pendekatan berbasis zonasi kemiskinan, serta analisis terhadap pelibatan lintas aktor dalam kebijakan lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam ranah kajian kebijakan publik, khususnya dalam memahami peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Berbeda dari sejumlah studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Palupi dan Ramadhani (2019), Farhani (2023), serta Rahayu dan Nugroho (2021) yang cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif dengan fokus pada efektivitas bantuan sosial, distribusi

program, atau validitas data, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap peran pemerintah daerah melalui perspektif teoritis peran dari Biddle & Thomas.

Keunikan dari penelitian ini terletak pada lokus yang dipilih, yakni Kabupaten Purworejo, sebuah wilayah yang termasuk dalam kategori zona merah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator resmi dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019. Lokus ini belum banyak disentuh secara spesifik oleh penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana ekspektasi masyarakat, norma kelembagaan, serta kinerja birokrasi lokal terjalin dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan, yang dijabarkan melalui dimensi harapan (*expectation*), norma (*norm*), perilaku aktual (*performance*), hingga evaluasi dan sanksi (*evaluation and sanction*).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengacu pada indikator kebijakan daerah yang berbasis zonasi kemiskinan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru yang lebih kontekstual mengenai dinamika implementasi kebijakan di tingkat daerah, sekaligus memperkaya literatur ilmiah tentang tata kelola penanggulangan kemiskinan berbasis lokal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam upaya penanggulangan kemiskinan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di daerah yang termasuk dalam zona merah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan kemiskinan. Menurut Moleong (2009), pendekatan kualitatif cocok untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dan bermakna. Sugiyono (2023) menyatakan bahwa metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami latar belakang dan konteks sosial secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini didukung oleh Kumar (2011), yang menekankan pentingnya pendekatan kualitatif dalam menganalisis proses sosial dan perilaku aktor kebijakan. Sementara itu, Usman dan Akbar (2022) menambahkan bahwa metode ini sangat relevan digunakan dalam studi kebijakan karena fokusnya pada pemaknaan dan partisipasi informan dalam memberikan data yang kaya dan kontekstual.

Metode ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika sosial, kebijakan, dan praktik pemerintahan secara lebih menyeluruh dalam konteks lokal yang spesifik. Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan informan yang dianggap paling memahami substansi permasalahan, seperti pejabat daerah, staf pelaksana program, serta tokoh masyarakat. Teknik ini dilengkapi dengan *snowball sampling* untuk memperluas cakupan informan berdasarkan rekomendasi dari narasumber awal yang dianggap kredibel.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap proses implementasi kebijakan serta

interaksi antara aktor-aktor yang terlibat. Selain itu, digunakan pula data sekunder berupa dokumen kebijakan daerah, laporan kegiatan, regulasi, dan arsip resmi yang relevan. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik, yaitu mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan. Analisis ini digunakan untuk menilai bagaimana peran pemerintah daerah dijalankan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat maupun menghambat keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo. Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun memiliki pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan program, seperti pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Sosial, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), serta tokoh masyarakat dan perangkat desa. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dilanjutkan dengan *snowball sampling* untuk mendapatkan informan tambahan yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengungkap peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program tersebut.

3.1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam menanggulangi kemiskinan merupakan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pembangunan sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, peran ini dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu harapan (*expectation*), norma (*norm*), perilaku pelaksanaan (*performance*), dan evaluasi serta sanksi (*evaluation and sanction*). Keempat dimensi tersebut memberikan kerangka analisis yang utuh untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah menjalankan perannya secara efektif.

a. Harapan (*Expectation*)

Dimensi harapan (*expectation*) mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap keterlibatan aktif pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Di Kabupaten Purworejo, masyarakat berharap agar pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga menciptakan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Harapan lain yang sering muncul adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat, pemerataan bantuan, dan perluasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pemerintah dituntut untuk lebih responsif dan terbuka terhadap aspirasi warga, khususnya di desa-desa yang masuk zona merah kemiskinan.

b. Norma (*Norm*)

Norma (*norm*) menggambarkan aturan atau ketentuan yang menjadi dasar formal dan moral bagi pemerintah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo berpedoman pada sejumlah regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan, serta Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Norma ini mengatur mekanisme kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sistem pelaporan, dan distribusi program. Kesesuaian antara tindakan pemerintah dan norma ini menjadi indikator penting dalam menjaga legitimasi dan efektivitas program.

c. Perilaku pelaksanaan (*Performance*)

Perilaku pelaksanaan (*performance*) mengacu pada bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh aktor-aktor pemerintah. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Purworejo telah menjalankan berbagai program, seperti PKH, BPNT, pelatihan kerja, dan program sanitasi dasar. Namun demikian, pelaksanaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data yang tidak mutakhir, ketimpangan antarwilayah, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan program. Meski begitu, sejumlah inisiatif lokal seperti pendampingan desa dan pelatihan wirausaha sudah mulai menunjukkan hasil positif.

d. Evaluasi dan sanksi (*Evaluation and sanction*)

Evaluasi (*evaluation*) menjadi dimensi penting dalam menilai sejauh mana program penanggulangan kemiskinan mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan evaluasi rutin melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah dan pelaporan kinerja TKPKD. Namun, sanksi (*sanction*) terhadap ketidaktepatan sasaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan belum berjalan optimal. Masih ditemukan tumpang tindih program antarinstansi dan kurangnya mekanisme korektif yang tegas. Ke depan, perlu dibangun sistem evaluasi berbasis data yang kuat dan partisipatif untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo

Dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo, terdapat sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan program, namun juga terdapat kendala yang menjadi penghambat di lapangan. Berikut adalah uraian dari kedua kategori tersebut:

a. Faktor Pendukung

1) Adanya Regulasi yang Mendukung

Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2023 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019. Regulasi ini memberikan arah kebijakan yang jelas dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.

2) Sumber Daya Manusia yang Berkompeten

Pelaksana program, baik di tingkat OPD maupun TKPKD, menunjukkan kapasitas dan pemahaman yang baik terhadap mekanisme program penanggulangan kemiskinan. Beberapa petugas memiliki pengalaman dan pelatihan teknis yang mendukung pelaksanaan program, seperti dalam pendataan, pengelolaan bantuan, dan fasilitasi pelatihan kerja.

3) Koordinasi Antar Pihak yang Berjalan Baik

Koordinasi antara perangkat daerah seperti BAPPEDA, Dinas Sosial, dan pihak desa berjalan cukup baik melalui forum rapat koordinasi dan pembagian tugas yang jelas. Mekanisme kerja lintas sektor ini memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan secara lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

b. Faktor Penghambat

1) Terbatasnya Alokasi Anggaran Daerah

Kendala utama dalam implementasi program adalah minimnya alokasi anggaran khusus untuk penanggulangan kemiskinan. Banyak program yang bergantung pada dana pusat, sementara dana daerah masih terbatas untuk menjangkau seluruh desa prioritas, khususnya desa dengan kondisi geografis sulit.

2) Validitas dan Ketepatan Data Kemiskinan

Data kemiskinan yang belum diperbarui secara rutin menjadi penghambat efektivitas program. Ketidaksesuaian antara data pusat dan daerah menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, serta menyulitkan proses perencanaan dan monitoring program yang akurat.

3) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Sebagian masyarakat penerima bantuan masih menunjukkan ketergantungan dan belum memiliki kesadaran penuh untuk berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan. Rendahnya inisiatif masyarakat untuk terlibat dalam pelatihan kerja atau usaha produktif menghambat tujuan jangka panjang dari program pengentasan kemiskinan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam penanggulangan kemiskinan dapat dipahami melalui empat dimensi utama: harapan (*expectation*), norma (*norm*), perilaku pelaksanaan (*performance*), serta evaluasi dan sanksi (*evaluation and sanction*). Keempat dimensi tersebut saling berhubungan dan secara komprehensif mencerminkan bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah yang termasuk dalam zona merah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Farhani (2023) yang menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai program bantuan dan pemberdayaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat miskin. Dalam konteks Kabupaten Purworejo, regulasi yang jelas, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023, telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan, memperkuat dimensi norma dalam analisis ini.

Berbeda dengan temuan Palupi dan Ramadhani (2019) yang lebih menyoroti efektivitas bantuan sosial dari sisi kuantitatif di tingkat nasional, penelitian ini menekankan pentingnya

perilaku pelaksanaan, yakni bagaimana perangkat daerah dan tim pelaksana menjalankan program di tingkat lokal. Di Purworejo, meskipun program seperti PKH dan BPNT telah berjalan, pelaksanaan program masih menghadapi kendala pada aspek validitas data dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, yang menunjukkan perlunya penguatan dari sisi pelaksana teknis.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa koordinasi antarperangkat daerah dan keterlibatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berkontribusi positif terhadap implementasi program, selaras dengan hasil studi oleh Supriyanto dkk. (2020) yang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Namun, dibandingkan dengan struktur birokrasi di kota besar seperti dalam penelitian Iman dkk. (2023) di Depok, struktur organisasi di Kabupaten Purworejo yang lebih sederhana memungkinkan koordinasi berjalan lebih efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Menariknya, dalam dimensi harapan, masyarakat Purworejo menunjukkan aspirasi yang cukup tinggi terhadap peningkatan program pemberdayaan ekonomi daripada sekadar bantuan sosial. Hal ini memberikan sinyal bahwa pendekatan top-down saja tidak cukup, dan partisipasi warga perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya menguatkan beberapa hasil studi terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi empiris baru dalam konteks pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah rural dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan gambaran mendalam mengenai realitas implementasi kebijakan di tingkat lokal, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama yang dianalisis berdasarkan dimensi harapan, norma, perilaku pelaksanaan, serta evaluasi dan sanksi, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa temuan menarik lainnya yang berada di luar kerangka teori utama. Salah satu temuan tersebut adalah perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menilai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah umumnya memandang bahwa keberhasilan dapat diukur dari jumlah bantuan sosial yang telah disalurkan, sedangkan masyarakat lebih menitikberatkan pada dampak langsung yang mereka rasakan, seperti peningkatan pendapatan, akses terhadap pekerjaan, dan keberlanjutan ekonomi keluarga. Perbedaan sudut pandang ini dapat menimbulkan kesenjangan ekspektasi yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dan kurang memiliki motivasi untuk mengikuti program pemberdayaan. Rendahnya partisipasi dalam pelatihan keterampilan atau program ekonomi produktif menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan belum sepenuhnya diterima sebagai solusi jangka panjang. Di sisi lain, beberapa informan dari perangkat desa mengungkapkan bahwa proses pendataan calon penerima bantuan sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial maupun kepentingan politik lokal, terutama menjelang pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa tidak terlepas dari dinamika sosial-politik setempat, yang

apabila tidak dikelola secara bijaksana dapat mengganggu objektivitas program serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya melalui berbagai kebijakan dan program, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Mengacu pada empat dimensi peran yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu harapan (*expectation*), norma (*norm*), perilaku pelaksanaan (*performance*), dan evaluasi serta sanksi (*evaluation and sanction*), ditemukan bahwa peran pemerintah daerah secara umum sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun masih belum optimal dalam hal efektivitas dan pemerataan.

Pada dimensi *harapan*, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi, bukan hanya bantuan sosial semata. Pada dimensi *norma*, terdapat regulasi daerah yang cukup kuat seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019, yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Pada dimensi perilaku pelaksanaan, telah dilakukan berbagai upaya seperti penyaluran bantuan dan pelatihan kerja, namun masih terkendala oleh keterbatasan data yang akurat dan belum meratanya pelibatan masyarakat. Sementara itu, pada dimensi evaluasi dan sanksi, mekanisme evaluasi telah tersedia namun belum berjalan secara menyeluruh dan belum dilengkapi dengan sistem sanksi yang tegas terhadap ketidaktepatan pelaksanaan program.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi faktor pendukung seperti tersedianya regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, dan koordinasi antarinstansi yang relatif baik. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat seperti terbatasnya anggaran daerah, validitas data kemiskinan yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan basis data yang lebih akurat dan terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM pelaksana, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta pendekatan sosial yang lebih partisipatif untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di masa mendatang. Pemerintah daerah juga perlu memperluas edukasi dan komunikasi publik guna membangun kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam proses pembangunan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada wilayah Kabupaten Purworejo dan jumlah informan yang relatif sedikit, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses terhadap dokumen internal pemerintah daerah membatasi pendalaman analisis terhadap implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada kajian komparatif antar daerah, penggunaan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas program, serta analisis lebih lanjut terhadap peran partisipasi masyarakat dan kualitas data dalam mendukung keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, serta seluruh instansi terkait yang telah memberikan dukungan, izin, dan fasilitas dalam menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo. (2024). *Rekap verval kriteria kemiskinan per kecamatan 2023–2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2024). *Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purworejo Maret 2024*. <https://purworejokab.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2024*. <https://jateng.bps.go.id>
- Farhani, A. (2023). *Strategi pemerintah kabupaten dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bener Meriah* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id>
- Haruna, P. S. S., Mappamiring, M., & Yusuf, M. (2024). Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1). <https://journal.unismuh.ac.id>
- Kumar, R. (2011). *Research methodology* (3rd ed.). London: SAGE Publications Ltd.
- Lindiasari, P., & Ramadhani, A. W. (2019). Efektivitas bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di tengah perlambatan ekonomi Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1), 1–15. <https://journal2.um.ac.id/index.php/JESP/article/view/28921>
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2023.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Rivai, D. A. (2021). *Peran pemerintah kota Pekanbaru dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat* [Skripsi, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id>
- Setiawan, F. (2023). Analisis program penanggulangan kemiskinan daerah Kota Palangkaraya. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 55–65. <http://journal.upr.ac.id/index.php/JAP/article/view/8338>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2022). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zahrawati, F. (2020). Pembebasan jerat feminisasi kemiskinan. *Al Ma'rif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2(1), 30–38. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/ALMAARIEF/article/view/1327>

